

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN SISTEM PENDIDIKAN DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG

Rizka Ummu Khoeriyah¹, Nelly Rahmawati Ningsih², Titin Sutinah³, Abduloh⁴

^{1,2,3,4}Universitas Singaperbangsa

Email: rizkaummukhoeryah@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Karawang dengan fokus pada pemahaman kebijakan, proses pelaksanaan, peran aktor, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap tata kelola sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Karawang. Informan terdiri atas pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan manajemen sistem pendidikan telah diimplementasikan secara cukup efektif melalui penggunaan sistem digital seperti *Dapodik*, *e-Rapor*, dan *Rapor Pendidikan*. Implementasi kebijakan ini mendorong terciptanya tata kelola sekolah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur TIK, variasi kemampuan SDM, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Dukungan kelembagaan dari Dinas Pendidikan serta kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Temuan juga menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran, karena data digital belum optimal digunakan dalam pengambilan keputusan pedagogis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan berbasis praktik, pemerataan infrastruktur digital, dan integrasi manajemen data dalam perencanaan pembelajaran guna mewujudkan manajemen sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Sistem Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Tata Kelola Sekolah, Digitalisasi Pendidikan.

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the education system management policy at the school level in Karawang Regency, focusing on policy understanding, implementation processes, actor involvement, supporting and inhibiting factors, and its impact on school governance. The research employed a qualitative approach with a case study method conducted at several public elementary and junior high schools in Karawang Regency. The informants consisted of education office officials, school principals, teachers, education staff, and school supervisors selected through *purposive sampling*. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings reveal that the implementation of the education system management policy has been relatively effective through the use of digital systems such as *Dapodik*, *e-Rapor*, and *Rapor Pendidikan*. The policy has contributed to more transparent,

accountable, and efficient school governance. However, several challenges remain, including limited ICT infrastructure, varied human resource competencies, and a lack of continuous training. Institutional support from the Education Office and the leadership of school principals are key factors in the success of policy implementation. Moreover, the digitalization of education management has not yet significantly improved learning quality, as digital data are not optimally utilized for pedagogical decision-making. This study recommends strengthening practice-based training, ensuring equitable digital infrastructure, and integrating data management into instructional planning to achieve sustainable education system management.

Keywords: Education System Management, Policy Implementation, School Governance, Education Digitalization.

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan pada abad ke-21 menuntut adanya sistem manajemen pendidikan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada mutu. Pergeseran paradigma pendidikan ini tidak hanya menekankan pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga pada bagaimana satuan pendidikan dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen sistem pendidikan berperan penting dalam menjamin keberlanjutan proses pembelajaran melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis. Implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan menjadi faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang akuntabel dan berdaya saing (Mulyasa, 2020).

Dalam konteks kebijakan nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek, 2022) telah mengarahkan satuan pendidikan untuk menerapkan sistem manajemen berbasis digital seperti *Sistem Informasi Manajemen Sekolah* (SIM Sekolah), *Data Pokok Pendidikan* (Dapodik), dan *e-Rapor*. Sistem ini dirancang untuk memperkuat tata kelola pendidikan berbasis data (*data-driven governance*), meningkatkan efisiensi administrasi, serta mempermudah proses supervisi dan pelaporan kinerja. Digitalisasi manajemen pendidikan diharapkan mampu menciptakan budaya kerja kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat sekolah (Suhartono & Rahman, 2023).

Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan di berbagai daerah, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesenjangan digital menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sistem pendidikan berbasis teknologi (Putri & Santoso,

2023; Rahmawati & Handayani, 2022). Selain itu, sebagian guru dan tenaga kependidikan masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan (Wijaya, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga kesiapan para pelaku pendidikan di tingkat sekolah.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah satuan pendidikan negeri yang cukup besar dan heterogen. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang telah berupaya menerapkan sistem manajemen pendidikan berbasis digital guna memperkuat tata kelola sekolah dan transparansi pelaporan data. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung tata kelola yang berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan masih memerlukan kajian empiris.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Karawang; (2) menganalisis peran para aktor pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan; serta (4) menilai dampak kebijakan terhadap penguatan tata kelola dan mutu pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan manajemen pendidikan berbasis kebijakan publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola sekolah yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan di satuan pendidikan dalam konteks nyata. Menurut Moleong (2021), pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri makna di balik fenomena sosial secara alami. Sedangkan Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena kebijakan dalam konteks spesifik.

Penelitian ini dilakukan di beberapa SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karawang yang telah menerapkan kebijakan manajemen sistem pendidikan berbasis digital. Pemilihan lokasi dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kesiapan sekolah dalam menerapkan sistem informasi pendidikan dan tingkat keterlibatan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Informan penelitian ditentukan berdasarkan prinsip relevansi dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Informan terdiri dari: (1) pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang (bidang perencanaan dan sistem informasi pendidikan); (2) kepala sekolah SD dan SMP Negeri sebagai pelaksana kebijakan di satuan pendidikan; (3) guru dan tenaga kependidikan sebagai pengguna langsung sistem; serta (4) pengawas sekolah yang berperan dalam supervisi dan evaluasi implementasi kebijakan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10–15 orang, disesuaikan dengan prinsip kecukupan data (*data saturation*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu Wawancara mendalam dengan pejabat dinas, kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, pelaksanaan, dan hambatan implementasi. Kemudian observasi lapangan untuk melihat langsung proses penerapan sistem manajemen pendidikan digital di sekolah. Kemudian Studi dokumentasi yang meliputi analisis dokumen kebijakan, laporan dinas, Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan dokumen supervisi.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasi makna data untuk menjawab rumusan masalah dan menarik implikasi teoretis serta praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman terhadap kebijakan manajemen sistem pendidikan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas informan (kepala sekolah, guru, dan pejabat dinas) memahami kebijakan manajemen sistem pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian satuan pendidikan, akuntabilitas, dan mutu layanan pendidikan. Informan menyatakan bahwa kebijakan memberi ruang bagi sekolah untuk mengelola sumber daya dan merancang program sesuai kebutuhan peserta didik (pernyataan informan DA, YK, R). Pernyataan ini konsisten dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan prinsip tata kelola yang menekankan desentralisasi kewenangan serta peningkatan kapabilitas lokal (Sagala, 2013; Mulyasa, 2020).

Meski secara konseptual pemahaman sudah baik, beberapa informan mengindikasikan adanya ketidakmerataan pemahaman—sebagian guru menyatakan belum sepenuhnya memahami implementasi kebijakan (informan AC). Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa persebaran pemahaman kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi dan kapasitas SDM di tingkat sekolah

(Putri & Santoso, 2023).

2. Proses implementasi dan aktor yang terlibat

Implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi internal (rapat manajemen, penyusunan program kerja) dan pemanfaatan sistem digital (Dapodik, e-Rapor, Rapor Pendidikan). Peran-peran kunci teridentifikasi: kepala sekolah sebagai pemimpin strategis, guru/tenaga kependidikan sebagai pelaksana, operator sekolah mengelola data, serta komite sekolah sebagai mitra masyarakat (pernyataan DA, YK). Dinas Pendidikan memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring (informan R).

Pembagian peran ini sesuai dengan kerangka tata kelola sekolah yang efektif: kepemimpinan yang kuat, distribusi tugas yang jelas, dan keterlibatan pemangku kepentingan (Mulyasa, 2020). Selain itu, penggunaan aplikasi dan formulir online untuk supervisi menunjukkan upaya digitalisasi manajemen yang sejalan dengan arahan kebijakan nasional untuk *data-driven governance* (Kemdikbudristek, 2022).

3. Dukungan institusional dan ketersediaan fasilitas

Data lapangan mencatat adanya dukungan nyata dari Dinas Pendidikan berupa pelatihan dan monitoring sehingga beberapa sekolah memiliki infrastruktur (internet, komputer, Chromebook) dan operator terlatih (informan YK, R, DA). Namun, keberadaan fasilitas tidak seragam: beberapa informan menyebut keterbatasan jumlah perangkat dan ketidakstabilan internet sebagai kendala (informan DA, AC). Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang menempatkan infrastruktur dan kesiapan SDM sebagai determinan kunci keberhasilan digitalisasi manajemen sekolah (Putri & Santoso, 2023; Wijaya, 2021).

4. Kendala teknis dan non-teknis

Kendala yang sering muncul bersifat campuran:

- Teknis: keterbatasan perangkat dan ketidakstabilan jaringan internet (informan DA, AC).
- Non-teknis: variasi kemampuan SDM, koordinasi internal, dan komunikasi antar-pemangku kepentingan (informan AC, YK, R).

Secara teoritis, hambatan teknis dapat diatasi melalui investasi infrastruktur, sedangkan hambatan non-teknis membutuhkan intervensi kapasitas manusia (pelatihan berkelanjutan) dan perbaikan mekanisme koordinasi (Moleong, 2021; Creswell & Poth,

2018). Informan menyebut praktik-solusi seperti IHT (In House Training), sosialisasi, dan pembagian tugas operator sebagai langkah mitigasi (informan YK, DA).

5. Dampak terhadap tata kelola, efisiensi administrasi, dan mutu pendidikan

Secara umum informan menilai bahwa implementasi kebijakan yang didukung sistem digital telah meningkatkan tertib administrasi, transparansi data, dan akuntabilitas sekolah (informan DA, YK). Pengelolaan data yang lebih rapi memudahkan pemantauan perkembangan peserta didik dan pelaporan ke dinas. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan kebijakan digitalisasi manajemen pendidikan yang diuraikan oleh Kemdikbudristek (2022) serta temuan literatur mengenai efek positif SIM pada efisiensi administrasi (Suhartono & Rahman, 2023). Namun, beberapa informan mengingatkan bahwa peningkatan efisiensi administrasi belum selalu diikuti peningkatan mutu pembelajaran secara signifikan, karena faktor pedagogis—seperti kompetensi guru dalam memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan pembelajaran—masih perlu diperkuat (informan R, AC). Hal ini menggarisbawahi bahwa digitalisasi manajemen harus dipadukan dengan pengembangan kapasitas pedagogis (TPACK) agar data benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perbaikan pembelajaran (Mishra & Koehler, 2006).

6. Mekanisme evaluasi dan tindak lanjut

Sekolah melakukan evaluasi melalui rapat kerja, forum MGMP, dan refleksi kinerja; hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan penyesuaian teknis—mis. pembagian tugas operator, perbaikan alur pelaporan, dan program pelatihan tambahan (informan DA, AC). Dinas melakukan monitoring berkala dan supervisi akademik yang menjadi basis rekomendasi perbaikan (informan R). Praktik evaluasi-refleksi berkala ini sesuai prinsip *continuous improvement* dalam manajemen mutu pendidikan (Miles et al., 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Karawang telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Secara umum, pelaksanaan kebijakan ini telah berhasil membangun sistem tata kelola sekolah yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel. Mayoritas kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan memahami kebijakan tersebut sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian sekolah, efisiensi administrasi, dan mutu layanan pendidikan. Sistem digital

seperti *Dapodik*, *e-Rapor*, dan *Rapor Pendidikan* telah dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pengelolaan data dan pelaporan sekolah, meskipun pemahaman serta kemampuan penggunaan sistem di kalangan tenaga pendidik belum merata.

Implementasi kebijakan ini dijalankan melalui koordinasi yang melibatkan berbagai aktor pendidikan, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin strategis dalam mengarahkan program dan memfasilitasi penggunaan sistem digital, sedangkan guru dan operator sekolah bertanggung jawab terhadap input dan pengelolaan data pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pengawas melalui bimbingan teknis, pelatihan, serta supervisi berkala. Dukungan kelembagaan ini telah membantu sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan dengan lebih sistematis, namun disparitas fasilitas antar sekolah masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan terbagi menjadi dua, yaitu teknis dan non-teknis. Hambatan teknis meliputi keterbatasan perangkat teknologi, infrastruktur jaringan internet, serta kapasitas server yang belum memadai di beberapa wilayah. Sementara itu, hambatan non-teknis mencakup perbedaan kemampuan sumber daya manusia, komunikasi internal yang belum optimal, serta kurangnya keberlanjutan dalam program pelatihan. Sekolah umumnya mengatasi permasalahan ini melalui pelatihan internal (*In House Training*), pembagian tugas operator, dan kerja sama antar sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keseimbangan antara kesiapan teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola perubahan.

Dari sisi dampak, kebijakan manajemen sistem pendidikan berbasis digital telah membawa perubahan positif dalam tata kelola sekolah. Administrasi menjadi lebih tertib, proses pelaporan lebih cepat dan transparan, serta akuntabilitas pengelolaan meningkat. Digitalisasi manajemen juga memperkuat koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan dalam penyusunan serta pelaporan data pendidikan. Namun demikian, peningkatan efisiensi administrasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan mutu pembelajaran. Sebagian guru masih memanfaatkan sistem hanya untuk keperluan administratif tanpa mengoptimalkan data digital sebagai dasar pengambilan keputusan pedagogis. Dengan demikian, integrasi antara pengelolaan sistem digital dan pengembangan kompetensi pedagogik menjadi kunci agar kebijakan manajemen sistem pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih substansial terhadap kualitas pembelajaran di sekolah.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan manajemen sistem pendidikan di Kabupaten Karawang dapat dikategorikan efektif secara administratif namun masih perlu diperkuat secara substantif. Hal ini berarti kebijakan telah berhasil menciptakan sistem manajemen pendidikan yang efisien dan transparan, tetapi masih membutuhkan penguatan di bidang kompetensi sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur digital, dan budaya refleksi berkelanjutan agar tata kelola pendidikan dapat benar-benar berkelanjutan (*sustainable education management*).

Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang:
 - Perlu memperluas pelatihan berbasis praktik (*hands-on training*) dan pendampingan berkelanjutan bagi kepala sekolah, guru, dan operator sekolah.
 - Mengembangkan sistem evaluasi digital terpadu untuk memantau implementasi kebijakan secara real time di tingkat sekolah.
2. Bagi Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru):
 - Mendorong peningkatan literasi teknologi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).
 - Mengintegrasikan hasil dari *Rapor Pendidikan* dan data Dapodik dalam perencanaan pembelajaran dan supervisi guru agar kebijakan berdampak langsung pada mutu pembelajaran.
3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan:
 - Perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur TIK, terutama di sekolah dengan keterbatasan jaringan internet dan perangkat.
 - Mendorong kolaborasi antar sekolah melalui komunitas belajar digital (forum kepala sekolah atau MGMP) sebagai sarana berbagi praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan sistem pendidikan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - Disarankan melakukan penelitian kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan terhadap kinerja sekolah dan capaian pembelajaran siswa.
 - Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada jenjang pendidikan menengah atas untuk melihat perbedaan pola implementasi antar tingkat pendidikan di Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kemdikbudristek. (2022). *Kebijakan transformasi pembelajaran dan tata kelola digital di satuan pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, A., & Santoso, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pembelajaran digital di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 101–113.
- Rahmawati, F., & Handayani, N. (2022). Persepsi guru terhadap integrasi teknologi digital dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 7(2), 77–86.
- Suhartono, D., & Rahman, M. (2023). Digitalisasi manajemen pendidikan sebagai strategi peningkatan tata kelola sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(1), 34–48.
- Wijaya, H. (2021). Implementasi kebijakan sistem informasi pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Modern*, 5(2), 145–158.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). (2022). *Kebijakan transformasi pembelajaran dan tata kelola digital di satuan pendidikan*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, A., & Santoso, R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pembelajaran digital di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 8(2), 101–113.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, D., & Rahman, M. (2023). Digitalisasi manajemen pendidikan sebagai strategi peningkatan tata kelola sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(1), 34–48.
- Wijaya, H. (2021). Implementasi kebijakan sistem informasi pendidikan di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Modern*, 5(2), 145–158.